

NEGARA DAN POLITIK PENAMAAN DI JAWA DALAM PANDANGAN MENJADI MUSLIM KEKINIAN

Maskuri

Universitas Aisyah Yogyakarta

Abstract

Dalam pandangan masyarakat tradisional, pemberian nama kepada seseorang di Jawa bisa menjadi penanda klasifikasi sosial (kelas priyayi, kelas santri, kelas abangan, kelas bawah, kelas bangsawan, dan lain-lain), sekaligus sebagai penanda waktu atau kondisi ketika masyarakat Jawa dilahirkan. Namun, dalam 30 tahun terakhir, tradisi penamaan tersebut semakin ditinggalkan oleh generasi baru orang tua di Jawa dengan menggunakan nama-nama baru yang tidak pernah ada dalam perbendaharaan nama Jawa: variasi linguistiknya lebih luas dan memiliki makna berorientasi masa depan. Apakah pergeseran makna dalam penamaan memiliki hubungan yang dekat dengan Islamisasi di Jawa, mengingat perubahan ini melibatkan sejumlah besar nama Arab yang merupakan salah satu register keislaman di negeri ini? Dengan pendekatan penamaan yang memproses hampir sejuta nama penduduk di Kabupaten Blitar, penelitian ini membuktikan dengan jelas tentang peran negara secara tidak langsung dalam pertumbuhan orientasi keislaman generasi baru orangtua di Jawa. Masyarakat Jawa ingin menghubungkan masa depan anak-anak masyarakat Jawa dengan Islam. Generasi Muslim kekinian telah secara tidak langsung dibentuk oleh generasi baru orang tua ini melalui penamaan, di mana dunia baru yang masyarakat Jawa inginkan untuk anak-anak masyarakat Jawa terkait dengan Islam melalui nama-nama Arab yang memiliki orientasi untuk menjadi Muslim yang baik di era kekinian.

Kata kunci: Penamaan, Negara, Islam, Jawa

PENDAHULUAN

Pada berita viral terbaru di padangkita.com tahun 2020, ada beberapa nama warga Indonesia yang menjadi masyarakat sekitar terheran-heran. Yakni mulai dari nama Tuhan, Nabi, hingga setan. Disamping itu juga ada beberapa nama yang hanya memakai (.), (,) atau simbol saja. Padahal anak merupakan pelengkap kebahagiaan bagi pasangan hidup yang menikah dan berumah tangga. Bagi sebagian orang, memiliki seorang anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan

Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih lagi Maha penyayang.

Oleh sebab itulah, banyak orang tua dalam mencarikan nama yang bagus dengan makna serta arti yang baik pula. Hal ini berguna bagi kehidupan kelak anak-anaknya di masa yang akan datang karena nama merupakan do'a.

Namun, tak jarang juga ada orang tua yang memberikan nama anak masyarakat Jawa dengan terkesan sangat nyeleneh. Ada yang memakai tanda baca saja dan lebih parahnya ada pula yang menamai anaknya dengan nama

“Tuhan”. Beberapa nama yang peneliti gali, “Allah Husomat”, “Royal Jelly”, Andy Go To School”, “Anti Dandruf”, “Honda Suzuki Impalawati”, “titik (.)”, “Satria Baja Hitam”, dll.

Ada pertanyaan kritis yang perlu ditanyakan: Ada sebagian masyarakat menggugat nama seseorang tersebut, tetapi mengapa, baru sekarang orang mempertanyakan namanya berdasarkan etika agama? Apa yang sebenarnya terjadi pada rakyat Indonesia? Sementara pada saat yang sama, banyak sarjana memandang bahwa Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, sedang mengalami kebangkitan Islam. Apakah kebangkitan kesadaran tentang makna nama memiliki hubungan dekat dengan kebangkitan kesalehan Islam di Indonesia? Di sisi lain, nama-nama Arab yang telah diidentifikasi sebagai nama-nama Islam juga berkembang pesat dalam waktu yang bersamaan. Apakah pertumbuhan nama Arab di Jawa memiliki korelasi dengan kebangkitan Islam di negara ini? Artikel ini akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang dinamika nama-nama Arab di Jawa, kelompok etnolinguistik terbesar di Indonesia, dan hubungannya dengan Islamisasi di negara ini.

Orang Jawa memosisikan nama itu sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Dengan demikian, nama orang Jawa mengandung dimensi sosial yang lebih luas, dan dapat digunakan untuk menafsirkan dinamika sosial di Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penamaan untuk melihat Islamisasi di Jawa. Dengan narasi perhitungan pada umumnya yang dipertajam dengan etnografi, penelitian ini akan menjelaskan pertumbuhan orientasi Islam generasi kekinian di Jawa. Saya mengambil data dari Blitar, daerah yang dulunya dianggap sebagai basis abangan.

PENDEKATAN BARU ISLAM DI JAWA

Secara perhitungan pada umumnya, di Jawa memiliki identitas yang sama:

meninggalkan tradisi penamaan di Jawa dan mengadopsi nama-nama baru yang belum pernah ada dalam nama perbendaharaan di Jawa. Nama-nama khas Jawa yang digunakan oleh generasi sebelumnya semakin hilang dari perbendaharaan generasi kekinian di Jawa.

Dari deskripsi perhitungan pada umumnya di atas, antara tahun 1911-1980, nama-nama Jawa murni menduduki peringkat tertinggi di Blitar (setiap dekade lebih dari 50% populasi menggunakannya). Ini bisa membenarkan bahwa Blitar adalah salah satu rumah kejawaan di masa lalu. Namun, sejak transisi 1980-an hingga 1990-an, nama-nama Jawamurni turun secara drastis di wilayah ini, dan mendekati titik nadir pada tingkat sepuluh persen pada awal abad ke-21. Nama-nama Arab murni merayap hingga dua puluh enam persen pada periode yang sama. Pada saat yang sama, nama hibrida Jawa-Arab juga merayap hingga tiga puluh empat persen. Sementara itu, nama hibrida dan superhibrid Indonesia, yang sampai tahun 1970-an tidak digunakan oleh banyak orang Jawa, mengalami pertumbuhan pada akhir 1980-an. Secara khusus, nama superhibrid telah tumbuh dengan tajam sampai awal abad ke-21.

Deskripsi perhitungan pada umumnya di atas mengkonfirmasi kesimpulan: dalam transisi dari 1980-an ke 1990-an, ada perubahan dramatis dalam penamaan Jawa, di mana nama-nama Jawamurni menurun secara dramatis, sementara pada saat yang sama, nama-nama Arab dan nama-nama hibrida (hibrida Jawa-Arab), Hibrida Indonesia, dan superhybrid) telah meningkat. Di antara kategori nama yang meningkat secara dramatis adalah nama superhibrid, yang nama hibridanya terdiri dari tiga bahasa atau lebih, terutama nama Jawa-Arab-Eropa. Apa yang menyebabkan perubahan penamaan yang dramatis di Jawa? Beberapa uraian antropologis berikut mungkin dapat membuka narasi sosial yang tersembunyi dalam dinamika identitas Jawa.

ANTROPOLOGI PENAMAAN DI JAWA

Di masa lalu, masyarakat Jawadiklasifikasikan menjadi 3 sub-budaya: Santri, Abangan, dan Priyayi. Klasifikasi sosial

juga tercermin dalam penamaan Jawa. Keluarga Abangan biasanya memberi nama Jawa yang cocok untuk anak-anak masyarakat Jawa (seperti Senen atau Pahing), atau nama sederhana, seperti Sidin atau Sirin. Keluarga Priyayi biasanya memberi nama Bambang atau Joko dengan nama tambahan lain untuk putra masyarakat Jawa, sementara keluarga Santri biasanya memberi nama Arab untuk bayi masyarakat Jawa, seperti Muhammad, Abdul, atau Siti dengan nama tambahan lainnya.

Keluarga petani biasanya memberi nama pendek untuk bayi masyarakat Jawa, yang sering merujuk pada kelahiran bayi, seperti: Ponimin, Ponijan, Poniyah, dan Poniem (yang merujuk pada hari Jawa: Pon); Legimin, Legino, Legiyah, dan Legiyem (yang merujuk pada hari Jawa: Legi), atau Wagiran, Wagino, Waginah, atau Wagiyah (yang merujuk pada hari Jawa: Upah). Selain itu, keluarga petani sering memberi nama yang memiliki makna sederhana untuk anak-anak masyarakat Jawa, seperti Bejo, Slamet, Untung, dan sebagainya. Di kelas yang lebih tinggi, banyak nama diambil dari cerita-cerita wayang atau sastra Jawa, seperti Sukarno, Suhadi, Sri Sumarah, Lestari, atau Kartini, sedangkan Santri kelas bawah sering mengadopsi nama-nama dari bahasa Arab, seperti Durrahman, Alip, Kusin, Aminah, dll.

Di masa lalu, kebanyakan orang Jawa umumnya tidak melakukan upacara penamaan. Sebagian besar keluarga memberi nama kepada bayi yang baru lahir ketika dia dilahirkan, yang disertai dengan upacara slametan atau brokohan. Upacara ini hanya dimaksudkan untuk merayakan kelahiran bayi, bukan upacara penamaan, karena nama itu diberikan secara otomatis. Keluarga Santri mengadakan upacara penamaan pada hari ketujuh setelah kelahiran dengan upacara aqiqah atau "kekah" (menurut bahasa Jawa), disertai dengan pembantaian kambing (satu kambing untuk seorang gadis, atau dua kambing untuk seorang anak laki-laki) untuk dimasak dan dibagikan kepada

tetangga.

Orang tua Jawa juga tahu nama mana yang akan diberikan kepada anak-anak masyarakat Jawa, menurut kelas sosial. Seorang petani, misalnya, tidak akan diberi nama yang diakhiri dengan -kusuma, -tanaya, atau -ningrat. Nama-nama ini hanya cocok untuk priyayi Jawa. Seorang petani tidak akan merasa nyaman memberikan nama-nama ini kepada anak-anak masyarakat Jawa, tidak hanya karena diejek oleh seluruh desa masyarakat Jawa, tetapi juga karena ada kepercayaan bahwa nama seperti itu akan membawa nasib buruk bagi anak-anak masyarakat Jawa, karena itu "terlalu berat" untuk masyarakat Jawa (dalam bahasa Jawa disebut "kaboten jeneng"). Seperti yang dinyatakan Uhlenbeck, nama-nama yang dianggap memenuhi syarat untuk kelas bawah (petani) biasanya nama-nama sederhana dengan akhiran "-em" atau "-en" untuk wanita, atau "-an", "-in", atau "-un" untuk pria.

Salah satu cara penamaan anak yang berlaku di Jawa juga termasuk lapisan peradaban global yang pernah berkembang di Jawa: Sanskerta; Arab / Islam; dan Barat. Banyak orang Jawa memiliki nama yang terasa "Sanskritized," sementara banyak dari masyarakat Jawa juga memiliki nama Arab atau "Arab". Beberapa nama juga "Persia," tetapi masih dikategorikan sebagai nama Arab. Banyak nama juga mengadopsi nama barat, atau nama "kebarat-baratan". "Nama asing" yang digunakan di Jawa juga dapat dikaitkan dengan banyak lapisan sejarah Indonesia. Hindu dan Budha kini telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, juga bahasa Sansekerta. Islam datang ke Jawa pada abad ke-15 (atau bahkan lebih awal), dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, termasuk sastra dan nama-nama Arab. Kolonialisme Barat pernah menjajah negara ini selama ratusan tahun, dan masih bertahan dalam bentuk globalisasi saat ini.

Orang Jawa mudah dikenali dari namanya. Nama-nama masyarakat Jawa tampak sederhana, dengan hanya satu suku kata atau dua suku kata, dengan akhiran "o" untuk pria, dan akhiran "i" untuk wanita. Anak-anak selalu dipanggil dengan nama panggilan ayah, yang sering berubah sepanjang masa kecilnya. Nama

masa kecil hanyalah nama sementara. Namun, ketika bocah itu menjadi lelaki, nama baru menjadi penting. Oleh karena itu, upacara pemberian nama baru untuk anak laki-laki yang telah menjadi dewasa adalah peristiwa penting, dan biasanya diadakan bertepatan dengan waktu pernikahan. Nama dewasa ini hanya berlaku untuk pria, karena wanita itu biasanya menggunakan nama suaminya.

Meskipun ada cendekiawan yang telah memeriksa nama-nama Jawa, banyak dari masyarakat Jawa tidak mengungkapkan peran negara dalam penamaan orang-orang masyarakat Jawa. Meskipun Uhlenbeck telah melakukan penelitian tentang perubahan nama di Jawa, ia tidak mengarahkan analisisnya tentang pengaruh KTP dan akta kelahiran (yang dikeluarkan oleh negara) dalam penamaan. Dengan kartu identitas yang menunjukkan tempat tinggal, secara resmi diakui oleh negara, kesempatan untuk mengubah nama dalam tradisi Jawa (dari nama masa kanak-kanak menjadi nama dewasa) menjadi sulit, karena fakta bahwa proses penggantian nama melibatkan prosedur pengadilan yang rumit, dan berimplikasi pada perubahan tersebut. dari semua dokumen resmi, seperti ijazah, rekening bank, SIM (SIM), dan sebagainya. Dengan prosedur yang rumit ini, orang enggan untuk mengurus pergantian nama, sehingga nama bayi biasanya didefinisikan mulai saat lahir.

Karena namanya telah didefinisikan dengan pasti sejak kelahiran bayi, penamaan tidak dapat lagi diberikan secara sederhana, karena nama masa kecil diberikan di masa lalu. Proses penamaan anak-anak untuk orang Jawasekarang tidak termasuk nama-nama tradisional Jawa. Masyarakat Jawa melibatkan penggunaan nama-nama yang lebih modern yang lebih menyenangkan di telinga. Beberapa sarjana mengatakan bahwa penamaan kontemporer Jawasemakin menghindari konotasi negatif: mis. kelas bawah atau julukan memalukan, atau nama-nama buruk dan bodoh dengan maksud untuk menangkai pengaruh buruk roh-roh jahat. Salah satu perubahan penting

dalam praktik penamaan di Jawa adalah bahwa masyarakat Jawa kontemporer mencoba memilih nama yang berkonotasi dengan citra baik, positif, dan modern untuk anak-anak masyarakat Jawa.

LITERASI ISLAM, STANDARDISASI AGAMA, DAN PILIHAN NAMA ARAB

Menanggapi tragedi nasional 1965 (G30S / PKI), Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memberlakukan dekret (TAP MPRS No. XXVII / MPRS / 1966) untuk menegakkan kewajiban pendidikan agama di semua tingkat pendidikan di Indonesia. Sejak itu, pendidikan agama telah menjadi wajib di semua tingkatan sekolah dan perguruan tinggi. Itu adalah titik balik bagi pendidikan agama Islam, karena sudah lama tidak pernah memperoleh tempat struktural di sekolah-sekolah negeri. Sebelum adopsi Keputusan MPRS, pendidikan agama Islam hanya opsional di sekolah umum. Bahkan, di banyak sekolah di pedesaan Jawa, pendidikan Islam diberikan secara gratis oleh para guru Abangan yang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam normatif. Namun, sejak adopsi Keputusan MPRS tahun 1966, pendidikan agama telah menjadi wajib bagi semua siswa di semua tingkat pendidikan, tanpa alasan untuk menolak atau menolaknya.

Negara menerapkan kebijakan ini dengan mengoptimalkan lulusan Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk mengajar Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah negeri dan swasta, termasuk di sekolah-sekolah pedesaan yang menjadi dasar Abangan. Di tengah-tengah tragedi pasca 1965, banyak guru Abangan yang berafiliasi dengan PKI telah menjadi korban pembantaian. Pendidikan Islam yang diajarkan oleh guru-guru Abangan akan menjadi kontra-produktif, karena ini hanya akan memicu reaksi kaum Muslim yang baru saja memenangkan pertempuran ideologis melawan komunisme. Siapa pun yang menentang Islam atau mengejek Islam akan dituduh berafiliasi dengan PKI, dan berisiko dibantai. Karena itu, orang Abangan yang sejauh ini menjadi pendukung PKI memilih keselamatan dengan menerima kebijakan negara apa pun, termasuk menerima guru-guru Islam yang ditempatkan oleh negara

di sekolah-sekolah di desa masyarakat Jawa.

Guru agama Islam yang ditempatkan di desa Abangan menyajikan ajaran Islam yang berbeda dari tradisi Islam Abangan. Meskipun Abangan adalah Muslim, ada banyak praktik Islam yang tidak masyarakat Jawa praktikkan: masyarakat Jawa tidak melakukan sholat, puasa, zakat, atau peziarah, dan tidak bisa membaca Al-Quran. Masyarakat Jawa benar-benar mempraktikkan kepercayaan kuno Kejawa yang secara substansial bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui pendidikan agama Islam yang dilakukan 2 jam seminggu di sekolah oleh guru-guru Islam yang "kompeten", anak-anak Abangan belajar tentang Islam normatif, tidak seperti orang tua dan keluarga masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa diajari tentang tauhid, syirik, dan ritual Islam, seperti sholat, wudhu, mencuci, zakat, puasa, dan lainnya.

"Apa yang membuat saya terkejut ketika pertama kali diajarkan oleh Pak Ramlan (seorang guru agama) adalah bahwa persembahan bagi orang mati adalah syirik. Awalnya, saya menentang ajaran dalam hati saya, tetapi setelah saya berpikir, eh benar, tidak mungkin Gusti Allah diberi persembahan makanan".

Literasi Alquran adalah salah satu ajaran Islam di sekolah. Itu sulit, tetapi menantang. Masyarakat Jawa sangat gembira dengan hadiah 10 kebaikan dengan membaca satu huruf Al-Quran, meskipun masyarakat Jawa merasa sulit untuk membacanya, terutama membedakan beberapa suara yang hampir mirip. Dalam fonologi Arab, ada bunyi yang hampir identik, seperti bunyi / s /, / sy /, dan / sh /. Namun, suaranya menantang bagi anak-anak Abangan. Tidak semua anak akhirnya bisa membaca Quran, tetapi suara surgawi merangsang orientasi Islam yang lebih normatif tentang kesalehan. Banyak dari masyarakat Jawa kemudian meminta jam tambahan dengan guru agama Islam untuk mengajarkan literasi Al-Quran di sore atau

malam hari.

"Saya bisa membaca Quran ketika saya masih di kelas dua SMP. Saat itu tidak ada masjid di desa saya. Ada masjid, tapi jauh sekali. Pada pertengahan tahun 1970-an ada seorang guru agama yang tinggal di rumah tetangga saya. Saya suka dia ketika dia mengajar pengajaran agama, karena dia lucu. Dia menjelaskan banyak hal tentang Islam. Meskipun saya seorang Muslim sejak lahir, saya tidak mengerti banyak hal. Dia mengajari saya dari bawah. Juga, ia mengajarkan literasi Alquran setelah maghrib. Saya ingat ketika dia mengajar Quran. Membedakan beberapa suara yang hampir identik adalah menarik. Saat itu, ia mengatakan bahwa membaca Al-Quran harus fasih (fasih), karena jika tidak lancar, ia dapat mengubah makna Al-Quran. Itulah yang saya pegang teguh sampai sekarang".

Apa yang dikatakan oleh para saksi ini mirip dengan bagaimana Gade menggambarkan atmosfer pertumbuhan pembelajaran Al-Quran 30 tahun kemudian, meskipun tidak sebesar seperti pada tahun 1990-an ketika Gade melakukan penelitian di Indonesia. Karena bacaan Al-Quran dibawakan kepada anak-anak, beberapa dari masyarakat Jawa mengalami "tarikan yang menarik" yang mungkin tidak masyarakat Jawa duga, di mana pertunangan ini membawa motivasi yang lebih luas dan menghasilkan rasa religiusitas yang meningkat. Dengan teknik membaca yang benar (makhrāj al-huruf dan tajwid), pembelajaran Al-Qur'an menghasilkan tingkat baru pemahaman diri dan inspirasi yang menjadi motivasi siswa.

Ajaran Islam dan literasi Alquran di sekolah-sekolah tampaknya menumbuhkan kesadaran baru pada anak-anak bahwa ada sesuatu yang berbeda dari apa yang masyarakat Jawa pahami dan alami dalam keluarga: ajaran Islam yang masyarakat Jawa pelajari dari keluarga masyarakat Jawa salah. Kesadaran berikutnya yang tumbuh adalah orientasi baru

menuju kesalehan Islam yang lebih normatif, berbeda dengan tradisi Islam Kejawaen yang terjadi dalam keluarga masyarakat Jawa.

“Pelajaran agama sangat mengesankan, meski hanya terbatas. Namun demikian, itu memberikan dasar bagi perkembangan saya sendiri. Pada tahun 1970an sudah mulai ada pembacaan Islam. Ada banyak kyai yang datang ke desa. Banyak orang datang mengikuti ceramahnya. Saya sering diundang oleh ayah saya untuk ikut kuliah. Saya juga memperhatikan apa yang dikatakan dosen. Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan kepercayaan orang tua. Mengapa umat Islam tidak berdoa, tidak puasa, bukan zakat? Meskipun itu jelas diperintahkan dalam Al Qur'an”.

Orientasi baru menuju kesalehan Islam yang lebih normatif tidak berhenti di sekolah. Panggilan kesalehan Islam selalu menarik masyarakat Jawa untuk terus belajar dan mencari pengajaran Islam yang lebih normatif. Di tengah semangat tumbuh pembelajaran Islam normatif, gerakan dakwah lebih intensif dilaksanakan. Ketika mahasiswa masuk perguruan tinggi, masyarakat Jawa disambut oleh Gerakan Dakwah Kampus, yang telah menjamur sejak 1980-an.

“Saya tidak menyangka kampus UGM yang merupakan universitas negeri ternyata banyak kegiatan Islami. Pada awal 1990-an kegiatan Ramadhan di Kampus luar biasa. Seluruh kampus tiba-tiba Islami. Sebagai anak plebeian, saya merasa di sinilah saya dapat belajar Islam modern, ada banyak dosen yang merupakan intelektual Muslim terkemuka, seperti Amien Rais.

Tidak seperti Islam di desa kejawaen kami”.

Anak-anak orang tua Abangan pada generasi pasca-G30S / PKI memengaruhi nama anak-anak masyarakat Jawa ketika masyarakat Jawa menjadi generasi baru orang tua setelah menikah: masyarakat Jawa cenderung memilih nama-nama Arab. Pilihan nama Arab menunjukkan bahwa masyarakat Jawa ingin menghubungkan masa depan anak-anak masyarakat Jawa dengan Islam.

“Tentu, saya memilih nama Arab. Saya mengumpulkannya sendiri: Muhammad Fauzan Akbar. Itu berarti baik, terpuji dengan kemenangan besar. Saya ingin anak saya berada di jalan Islam. Jadi, paling lambat, ia harus tetap dalam Islam”.

Namun, nama-nama Arab yang masyarakat Jawa gunakan untuk memberi nama anak-anak masyarakat Jawa tidak lagi sama dengan generasi sebelumnya. Nama-nama Arab dari generasi sebelumnya cenderung menggunakan nama-nama Arab yang diizinkan, sedangkan nama-nama Arab yang digunakan oleh generasi baru orang tua cenderung menggunakan nama-nama Arab murni, nama-nama Arab yang diglobalisasi, dan nama-nama Arab yang dikombinasikan dengan elemen-elemen linguistik lainnya. Secara umum, masyarakat Jawa ingin menunjukkan prestasi baru dalam kesalehan Islam: lebih banyak (Al-Quran) melek, dan dalam beberapa hal lebih kosmopolitan.

“Nama anak-anak sesuai dengan zaman. Tentu saja, itu juga harus sesuai dengan perkembangan yang ada, termasuk nama-nama Arab. Saat ini, menulis nama Arab bahwa jika ceroboh akan ditertawakan orang. Jika itu ditulis seperti orang tua dulu kuno. Ada standarisasi tulisan Arab dalam aksara Latin. Secara otomatis, nama-nama Arab juga harus mematuhi standar itu”.

Dalam konteks penamaan, nama-nama Arab yang telah diberikan kepada anak-anak yang lahir sejak 1980-an telah dimurnikan, menggunakan transliterasi Arab-Indonesia

standar. Oleh karena itu, beberapa kesalahan dalam transliterasi nama-nama dalam dokumen resmi negara (seperti kartu ID) tidak dapat lagi diubah, dan dengan demikian menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi para pembawa kartu-kartu itu, karena masyarakat jawa membuat masyarakat jawa tampak buta huruf secara Quran.

“Beberapa tahun yang lalu, salah satu murid saya datang ke rumah. Secara khusus, dia berterima kasih kepada saya karena menyarankan diganti. Nama aslinya adalah Parjiman. Dia dulunya sangat pintar, meskipun berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Sebagai seorang guru agama, saya menyesal namanya, itu berarti kotor. Saya menyarankan dia mengganti nama, sementara ada banyak sekali akta kelahiran. Orang tuanya setuju. Dengan demikian, dalam akta kelahirannya tertulis nama baru: Fajri Ahmad. Rupanya, dia sekarang seorang pejabat di Kementerian Agama ”.

Di tengah gelombang kebangkitan Islam di Indonesia, pemurnian merupakan aspek integral. Saat ini, segala sesuatu yang mengandung tradisi dipertanyakan dan digugat karena dasar keagamaannya. Jika tradisi itu tidak berasal dari Nabi, itu bisa disebut bid'ah, termasuk semua perbuatan yang tidak memiliki bukti syar'i sejak zaman Nabi. Selain itu, semua hal terbaru yang tidak ada hubungannya dengan konteks agama cenderung diislamkan, seperti kosmetik Islam, hotel syariah, dan sebagainya.

Pendidikan Islam yang diperkenalkan dan diwajibkan oleh negara sejak awal 1970-an telah menyebabkan anak-anak Abangan memiliki semacam kompetensi komunikatif dalam literasi Islam. Sekarang masyarakat jawa telah tumbuh menjadi generasi baru orang tua dalam keluarga muda. Dengan kompetensi komunikatif

dalam literatur Islam yang lebih berkembang daripada generasi orang tua sebelumnya, masyarakat jawa memilih nama Arab untuk anak-anak masyarakat jawa. Namun, pilihan masyarakat jawa atas nama-nama Arab yang cenderung dimurnikan (sebagai tanda melekat huruf Al-Quran) dan mengglobal (sebagai tanda kosmopolitanisme) menunjukkan bahwa masyarakat jawa ingin berbeda dari nama-nama Arab dari generasi Muslim sebelumnya, yang cenderung dijinakkan (yang merupakan penanda buta huruf Al-Quran). Seperti politik onomastik, tanggung Jawab generasi baru orang tua dalam menamai anak-anak masyarakat jawa adalah salah satu bentuk narsisme yang harus diakui dalam generasi baru Muslim. Beberapa dari masyarakat jawa memilih nama-nama standar Arab sebagai implementasi dari ajaran agama yang telah masyarakat jawa pelajari, terutama memilih nama yang baik untuk anak-anak masyarakat jawa sebagai doa dan harapan untuk masa depan masyarakat jawa. Sebagai doa, nama-nama Arab harus sesuai dengan standar transliterasi yang tepat, agar tidak mengubah makna yang dimaksudkan.

PENDIDIKAN TINGGI, URBANISASI, DAN PILIHAN NAMA ARAB

Awal era Orde Baru dikenal sebagai era pembangunan, yang diuntungkan oleh booming minyak. Meningkatnya harga minyak global mendorong Indonesia untuk mengeksport minyak untuk mendanai pembangunan. Salah satu bentuk perkembangan adalah pengembangan pendidikan pada masa Orde Baru dengan program SD Inpres pada tahun akademik 1973/1974. Program memperluas akses ke pendidikan dengan membangun sekolah hingga tingkat desa sebagai bentuk dukungan untuk program wajib belajar pada tahun 1984. Kebijakan ini berdampak pada peningkatan jumlah anak sekolah dasar setiap tahun dan pembangunan sekolah. lebih banyak bangunan sekolah dasar.

Bagi masyarakat desa di Jawa pada waktu itu, kebijakan itu membuat akses ke pendidikan dasar lebih mudah dan lebih dekat. Sebelumnya, meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 telah menetapkan

program wajib belajar 6 tahun, akses ke pendidikan dasar di pedesaan Jawa tidak merata. Ada banyak desa yang tidak memiliki gedung sekolah, sehingga anak-anak masyarakat Jawa dipaksa melakukan perjalanan antar desa setiap pagi untuk belajar di sekolah. Masyarakat Jawa tidak didukung oleh fasilitas jalan yang tidak memadai, termasuk jalan berlumpur saat hujan. Keluarga petani tanpa tenaga kerja lebih suka mengorbankan pendidikan anak-anak masyarakat Jawa untuk bekerja di ladang atau mencari rumput untuk ternak masyarakat Jawa.

Kehadiran gedung sekolah (SD) di hampir setiap desa di Jawa dibarengi dengan pemberlakuan kebijakan Wajib Belajar 6 tahun sebelumnya. Sosialisasi kebijakan Wajib Belajar 6 tahun memiliki dampak luar biasa pada kesadaran keluarga petani di pedesaan Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa merasa bahwa dengan bersekolah, anak-anak masyarakat Jawa akan lebih pintar, tidak seperti diri masyarakat Jawa sendiri: buta huruf dan hanya mampu bekerja di ladang. Kepala desa terlibat aktif dalam mendorong warga untuk mengirim anak-anak masyarakat Jawa ke sekolah. Kepala desa bahkan mendatangi anak-anak di desanya yang enggan pergi ke sekolah.

“Saya ingat pada akhir 1970-an, ayah saya membelikan saya dua kambing, satu jantan dan satu betina. Dia mengatakan itu untuk persiapan sekolah setelah saya lulus sekolah dasar. Setelah 3 tahun, kambing sudah berkembang biak. Ketika saya memasuki sekolah menengah pertama, beberapa dari masyarakat Jawa dijual untuk membelikan saya sepeda yang saya gunakan untuk pergi ke sekolah. Itulah pertama kali terjadi di keluarga saya. Dua saudara perempuan saya hanya lulus sekolah dasar, sedangkan saya lulus sekolah menengah.

Untuk kuliah, saya mencari biaya sendiri”.

Beberapa anak di pedesaan Jawa yang belajar di SD Inpres tidak menyadari bahwa kehadiran masyarakat Jawa di bangku sekolah adalah titik awal pencabutan masyarakat Jawa dari akar budaya masyarakat Jawa di pertanian. Selusin tahun kemudian masyarakat Jawa tumbuh menjadi tenaga kerja terdidik, lulus dari berbagai universitas, dan siap bekerja di berbagai sektor di luar pertanian dan jauh dari rumah berbasis pertanian masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa melakukan urbanisasi. Dalam urbanisasi ini, masyarakat Jawa bertemu dengan pasangan masyarakat Jawa yang berbeda (bahkan dari luar Jawa). Masyarakat Jawa tumbuh menjadi keluarga baru. Pertumbuhan keluarga baru telah menyebabkan keterikatan masyarakat Jawa pada setiap tradisi menjadi longgar. Dalam memberi nama pada anak-anak, masyarakat Jawa tidak lagi bergantung pada tradisi untuk meminta nama orang yang lebih tua atau kyai. Masyarakat Jawa mengandalkan sumber-sumber terbaru dalam memberi nama anak-anak masyarakat Jawa: buku, majalah, dan internet.

Selain itu, pasangan yang jauh dari kampung halaman ini akhirnya harus berkompromi atas nama anak-anak masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa biasanya memilih nama-nama Arab sebagai tanda harapan dan doa untuk kesalehan anak-anak masyarakat Jawa, meskipun itu dikombinasikan dengan sumber daya linguistik lainnya.

“Sebagai pasangan orang Jawa-Minang, kami sepakat untuk tidak menyebut nama anak dengan nama Jawa atau Minang. Pilihannya adalah nama Arab, karena dapat mengakomodasi harapan kita baik tentang masa depan anak-anak, terutama anak-anak yang saleh”.

Dalam beberapa hal, nama Arab mewakili kompromi penamaan antara suami dan istri dari berbagai latar belakang. Istri-istri dalam keluarga baru ini mendapat manfaat dari kebijakan pendidikan Orde Baru yang berhasil dalam menyediakan pendidikan dasar, dan secara dramatis meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi. Meskipun pendaftaran perempuan masih jauh di belakang siswa laki-laki, kesenjangan itu terus menyempit. Pada tahun 1971, keseimbangan antara pria dan wanita di perguruan tinggi adalah 48%, tetapi pada tahun 1990, kesenjangan menyempit menjadi 29%. Pada 2009/2010, kesenjangan itu hampir tidak ada, hanya menyisakan 0,12%.

NEGARA DAN ISLAMISASI DALAM PERTUMBUHAN PENAMAAN ARAB

Dengan menelusuri sejarah perubahan umat Islam di Jawa, khususnya tragedi pasca-G30S / PKI, perayaan makna dalam penamaan anak-anak masyarakat Jawa akan dipahami dari konteks historis, yang ini tidak terlepas dari pengaruh negara. Pertama, umat Islam mengalami pertumbuhan dalam pendidikan dan melek huruf, yang telah sangat signifikan sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan program pendidikan melek huruf pada awal pemerintahan Sukarno, tingkat melek huruf orang Indonesia naik menjadi empat puluh persen pada tahun 1960-an. Pada 1990-an, ketika pemerintah Orde Baru masih berkuasa, angka melek huruf meningkat tajam hingga sembilan puluh persen. Laporan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 menyatakan bahwa tingkat melek huruf penduduk Indonesia, berusia 15-24, meningkat sebesar 99,68%, sedangkan tingkat melek huruf penduduk, usia 15-59 tahun, meningkat sebesar 97,17%. Selain itu, persentase orang yang menyelesaikan sekolah menengah meningkat secara dramatis, dari sekitar empat persen pada tahun 1970, menjadi lebih dari tiga puluh persen pada tahun 1990-an.

Dengan asumsi bahwa mayoritas penduduk di negara ini adalah Muslim, yang paling banyak mendapat manfaat dari program keaksaraan ini adalah Muslim. Dengan keterampilan membaca, masyarakat Jawa dapat memperluas cakrawala pemikiran masyarakat Jawa melalui bacaan, mengakses berbagai informasi melalui media, dan mengaktualisasikan gagasan

melalui tulisan. Hampir mirip dengan efek kapitalisme cetak terhadap nasionalisme Eropa, literasi Muslim dapat diselenggarakan bersamaan dengan perluasan pendidikan tinggi, dan kebangkitan pasar untuk buku dan surat kabar Islam. Ini mendorong "obyektifikasi pengetahuan Islam", di mana Islam menjadi objek yang menarik dari sejumlah orang yang jumlahnya semakin bertambah.

Kedua, kemunduran Muslim nominal (Abangan) di Jawa pasca G30S / 1965. Sebelum tragedi nasional, pendidikan agama di sekolah adalah opsional. Namun, setelah kemenangan tentara, bersama dengan Muslim dan agama-agama lain, memadamkan PKI dianggap perlu karena masyarakat Jawa dianggap pihak yang bertanggung jawab atas tragedi itu. MPRS, sebagai lembaga negara tertinggi, membentuk TAP MPRS No. XXVII / MPRS / 1966, yang mewajibkan semua sekolah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi siswa. Sebagai hasil dari kebijakan ini, pendidikan Islam menjadi wajib. Guru pendidikan Islam di sekolah bergabung dengan Pendidikan Guru Agama (PGA), sebuah sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Lulusan sekolah ini dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan sebagai guru pendidikan Islam. Masyarakat Jawa dapat ditempatkan di seluruh Indonesia. Sebagai akibat dari perubahan kebijakan ini, anak-anak Muslim nominal (Abangan), yang sebelumnya tidak dapat menerima pendidikan Islam yang sesuai dengan standar ortodoksi Islam, menerima pendidikan Islam normatif di antara para santri.

Meskipun ada beberapa perhitungan pada umumnya yang akurat, fokus ini pada pendidikan agama yang luas, kurang lebih, mempengaruhi pemahaman agama anak-anak Abangan. Pendidikan agama mendorong pertumbuhan gelombang besar "rasa ingin tahu masa kanak-kanak" dalam Islam yang semakin memfasilitasi acara-acara di luar pembelajaran agama di sekolah-sekolah, baik intra / ekstra-sekolah / perguruan tinggi. Akibatnya, pemahaman agama masyarakat Jawa menjadi lebih normatif, sesuai dengan ortodoksi Islam yang berlaku di kalangan Santri. Ini bertentangan dengan pemahaman agama orang

tua masyarakat Jawa, yang kurang ortodoks.

Para pengamat Indonesia telah lama menduga bahwa Abangan di Jawa telah mengalami kemunduran yang tajam. Jelas, penurunan ini bukan hanya karena pembelajaran Islam di sekolah selama dua jam seminggu. Namun, itu sebenarnya cukup efektif dalam menarik kaum muda dari Abangan untuk belajar Islam. Pasti ada alasan lain yang berkontribusi terhadap kemunduran suku Abangan di Jawa.

Ketika Orde Baru berkuasa, kehadiran negara menjadi lebih kuat. Akibatnya, tradisi lokal menjadi semakin lemah. Dalam konteks ini, bagi banyak orang di Indonesia, Islam dipandang sebagai alternatif yang aman dalam struktur politik yang dipandang sangat ketat. Terlepas dari kebangkitan Islam di Indonesia yang menyebabkan fragmentasi otoritas agama, seperti yang terlihat di banyak negara Muslim lainnya, atmosfer keagamaan di Indonesia menunjukkan karakteristik standar. Kebijakan negara hanya mengakui lima agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha) sebagai pilihan yang sah bagi warga negara. Orde Baru secara efektif berusaha menghapus agama-agama asli yang dipraktikkan dalam komunitas lokal. Para antropolog yang bekerja di bidang-bidang ini pada tahun 1970-an dan 1980-an memberikan laporan yang jelas tentang dampak merusak kebijakan terhadap agama-agama asli; kebijakan-kebijakan ini mendorong konversi ke Kristen atau Islam.

Kecewa dengan partisipasi organisasi-organisasi Muslim dalam pembantaian anti-komunis pada tahun 1965-1966, sejumlah orang Jawa - mungkin lima persen orang Jawa - mempraktikkan agama Hindu atau Kristen pada tahun-tahun awal Orde Baru, sementara yang lain mencari perlindungan di bawah payung "Aliran Kepercayaan". Namun, kedua perkembangan ini dibatasi oleh meningkatnya jumlah orang Jawa yang menjalankan agama Islam yang lebih konvensional.

Ketiga, peran Islam sipil dalam ruang partisipasi sipil menciptakan kerangka moral baru bagi masyarakat, dalam

menghadapi dunia yang berubah dengan cepat. Perubahan dalam konsumerisme, komunikasi, pendidikan dan politik pasca-1966 merusak hierarki dan nilai-nilai berbasis lokal. Bahkan orang-orang desa yang berada di sudut-sudut kepulauan diperkenalkan dengan barang-barang, mode dan ide-ide politik yang disebarluaskan secara nasional. Dengan peningkatan kehadiran negara, dan pembatasan pada struktur politik pada 1950-an, peran berbasis partai juga melemahkan struktur patronase, prestise lokal, dan identitas budaya yang dulunya milik. Perubahan itu membuat elit lokal menginvestasikan sumber daya masyarakat Jawa, daripada hubungan lokal masyarakat Jawa, pada barang-barang konsumen, pendidikan, dan modal yang mampu berfungsi sebagai mata uang di pasar negara ini. Hampir semua wilayah di negara ini menjadi lebih akomodatif. Gaya hidup dan tradisi lokal telah menjadi lebih Indonesia.

KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan beberapa data lapangan yang diuji melalui serangkaian diskusi dengan teori yang relevan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam artikel ini. Pertama, sejumlah besar nama orang yang dianalisis secara perhitungan pada umumnya dan dikontekstualisasikan dengan sejumlah perspektif dapat menjadi pendekatan yang andal untuk analisis sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pertumbuhan nama-nama Arab di Jawa sejak akhir 1980-an dapat mengarahkan analisis Islamisasi (pertumbuhan orientasi kesalehan Islam) di antara orang Jawa.

Kedua, dengan menggunakan penamaan yang dikembangkan dalam masyarakat sebagai pendekatan, kita juga dapat mengidentifikasi apa peran negara dalam Islamisasi di Jawa. Meskipun penamaan adalah kehendak bebas setiap individu di negara ini, perubahan politik di tingkat negara memiliki pengaruh besar pada tradisi penamaan di masyarakat. Inisiasi negara dalam melekat huruf dan pendidikan telah memberi manfaat bagi umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini. Masyarakat Jawa berhasil mengumpulkan modal sosial melalui pendidikan yang akhirnya membuat masyarakat Jawa mengalami mobilitas vertikal.

Di tengah narasi politik Islam yang didukung oleh negara, termasuk pendidikan agama, umat Islam juga menceritakan harapannya tentang masa depan anak-anak masyarakat Jawa untuk terhubung dengan kesalehan Islam melalui penamaan Islam dengan variasi linguistik yang lebih modern.

Bibliography

- Al-Syatibi, I., *Al-I'tishom: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anderson, B., *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Brooklyn: Verso, 2006.
- Aragon, L., *Divine Justice: Cosmology, Ritual and Protestant Mission in Central Sulawesi, Indonesia*. University of Illinois, Urbana: UMI, 1992.
- Atiyeh, G.N., *The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East*. New York: State University of New York Press, 1995.
- Atkinson, J.M., "Religions in Dialogue: The Construction of an Indonesian Minority Religion", *American Ethnologist*, Volume 10, Issue 4 (1983): 684-696.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Pendidikan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014.
- Baswir, R. *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*. Yogyakarta: Institute of Development and Economic Analysis dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Bowen, J.R., *Muslims Through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- Cederroth, S., *Survival and Profit in Rural Java: The Case of an East Javanese Village*. Richmond, Surrey: Curzon Press, 1995.
- Collins, E.F., "Islam and the Habits of Democracy", *Indonesia*, Volume 78 (2004): 93-120.
- Cribb, R. *The Indonesian Killings: Studies from Java and Bali*. Clayton Victoria. Australia: Center for Southeast Asian Studies Monash University, 1990.
- Derrida, J., "Signature Event Context", in *Margins of Philosophy*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1982.
- Djatmika, "Pemberian Nama Panggilan dalam Masyarakat Jawa: Sebuah Studi Kasus di Surakarta", a paper in *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Eickelman, D.F. & Piscatori, J. *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Gade, A.M. *Perfection Makes Practice: Learning, Emotion, and the Recited Qur'an in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2004.
- Geertz, C. *The Religion of Java*. New York: Free, 1960.
- Hatley, R. *What's in a name: Arti Sosial seperti Terlihat dalam Nama dan Perubahan Laziman (Mode) Nama di Jawa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1977.
- Hefner, R.W. *The Political Economy of Mountain Java: an Interpretive History*. Berkeley: University of California Press, 1990.
- Hefner, R.W. *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Hoskins, J., "Entering the Bitter House: Spirit Worship and Conversion in West Sumba", in *Indonesian Religions in Transition*. Tucson: University of Arizona Press, 1987: 136-160.
- Hull, T. & Jones, G., "Demographic Perspectives", in *Indonesia's New Order*. Hawaii: University of Hawaii Press, 1994.

- Hymes, D.H., "On Communicative Competence", in B. Pride and J. Holmes (eds.) *Sociolinguistics: Selected Readings*. London: Penguin Books Ltd., 1972: 269-293.
- Jones, G. & Manning, C., "Labour Force and Employment during the 1980s", in Anne Booth (ed.). *The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era*. Oxford: Oxford University Press, 1992: 363-410.
- Jones, G.W. *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Perkembangan Pendidikan Tinggi Tahun 199/2000 - 2013/2014*. Buku 1 ed. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015.
- Kim, H.J. *Reformist Muslims in a Yogyakarta Village*. Canberra: Department of Anthropology Australian National University, 1996.
- Kipp, R. *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kokoschka, A., "Islamizing the Market? Advertising, Products, and Consumption in an Islamic Framework in Syria", in *Muslim Societies in the Age of Mass Consumption*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009: 225-240
- Kraince, R.G., *The Role of Islamic Student Activists in Divergent Movements for Reform during Indonesia's Transition from Authoritarian Rule, 1998- 2001*. Ohio: Ohio University Press, 2003.
- Kuipers, J.C. *Language, Identity and Marginality in Indonesia: The Changing Nature of Ritual Speech on the Island of Sumba*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Lyon, M. *Politics and Religious Identity: Genesis of a Javanese-Hindu Movement in Rural Central Java*. Berkeley: Department of Anthropology University of California, 1977.
- Moordiati, "Saat Orang Jawa Memberi Nama: Studi Nama di Tahun 1950-2000", *Patrawidya*, Volume 16, Number 3 (September 2015): 381-390.
- Oey-Gardiner, M., "Gender Differences in Schooling in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 27 (1991): 57-79.
- Poensen, C., "Lets over Javaansche Naamgeving en Eigennamen", in *Mededeelingen Vanwege het Nederlandsche Zendeling Genootschap XIV*. Rotterdam: M. WYT & Zonen. 1870: 123-216.
- Pranowo, M. *Creating Islamic Tradition in Rural Java*. Melbourne Australia: Department of Anthropology and Sociology Monash University, 1991.
- Ricklefs, M. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, C. 1930 to the Present*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2012.
- Rosler, M., "Islamization and the Reshaping of Identities in Rural South Sulawesi", in *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu, HI: University of Hawaii Press, 1997: 275-306.
- Schwartz, A. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. Boulder: Westview, 1994.
- Spyer, P., "Diversity with a Difference: Adat and the New Order in Aru (Eastern Indonesia)", *Cultural Anthropology*, Volume 11, Issue 1 (1996): 25-50.

- Uhlenbeck, E.M., "Systematic Features of Javanese Personal Names", in Tatjana Soldatjenkova and Emmanuel Waegemans (eds.). *For East is East: Liber Amicorum Wojciech Skalmowski*. New York: International Linguistics Association, 1971: 321-335.
- Umam, M. K. (2019). Lembaga Pendidikan Islam Dalam Telaah Lingkungan Strategik. *Jurnal Tinta*, 1(2), 16-29.
- Umam, M. K. (2019). PERDAGANGAN ETHEREUM DI INDODAX EXCHANGE DALAM PERSFEKTIF SYARIAH. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 3(2).
- Umam, M. K. (2019). Penggunaan metode Jaritmatika dalam meningkatkan motivasi belajar. *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 45-68.
- Umam, M. K. (2020). DINAMISASI MANAJEMEN MUTU PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 8(1), 61-74.
- Umam, M. K. (2019). DIMENSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF ERA DISRUPSI PERSPEKTIF MANAJERIAL BIROKRASI. *AL-WIJDĀ N: Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 127-146.
- Umam, M. K. (2019). KOMITE MADRASAH DALAM KONTEKS MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 7(1), 39-56.
- Umam, M. K. (2019). KOMITE MADRASAH DALAM KONTEKS MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 7(1), 39-56.
- Umam, M. K. (2020). PENERAPAN METODE ARTIKULASI EKONOMI (Studi Kasus Di MAN Kota Blitar). *ASSYARIAH*, 1(1), 55-66.
- Umam, M. K. (2020). PARADIGMA SIMTOMA JIWA SEBAGAI METODE MEMAHAMI KOGNISI PESERTA DIDIK. *AT-THULLAB: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1).
- Umam, M. K. INNOVATION OF TRANSFORMATIVE ISLAMIC EDUCATION STRATEGY.
- Umam, M. K. (2019). SCHOOL HEAD STRATEGY IN INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION IN SDIT AL-ARIF FROM THE PRASARANA MEANS STANDARD. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(1).
- Umam, M. K. (2019). PERDAGANGAN ETHEREUM DI INDODAX EXCHANGE DALAM PERSFEKTIF SYARIAH. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 3(2).
- Umam, M. K. (2018, April). Reconstruction of Integrative Islamic Education in The Transformative Profetical Education Framework. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 511-520).
- Umam, M. K. (2017, May). Strategi Alternatif Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Pedesaan Berbasis Sekolah Excellent Perspektif Kompetitif Kotemporer. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 2, pp. 769-776).
- Umam, M. K. (2017). Analisis Lingkungan Strategik Dalam Corak Penyelenggaraan Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 5(1), 1-8.
- Umam, M. K. (2018, February). Paradigma Pendidikan Profetik dalam Pendekatan Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah. In *PROCEEDING: The Annual*

- International Conference on Islamic Education* (Vol. 3, No. 1, pp. 120-132).
- Umam, M. K. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(2), 62-76.
- Umam, M. K. (2018). Imam Para Nabi: Menelusur Jejak Kepemimpinan dan Manajerial Nabi Muhammad saw. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(1), 59-74.
- Umam, M. K. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Islam Integrasi Dalam Kerangka Pendidikan Profetik Transformatif.
- Muliati, B., & Umam, M. K. (2019). Phenomenon Of Changes In Increasing Development Of Students In Basic School. *MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1), 96-105.
- Umam, M. K. (2018). STRATEGI INTELEKTUALISASI PROGESIFITAS MANHAJUL AL FIKR KADER AN-NAHDLIYAH.
- Umam, M. K. (2019). Penggunaan Metode Jaritmatika Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar. *Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 45-68.
- Umam, M. K. (2019). KOMITE MADRASAH DALAM KONTEKS MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Al-Hikmah*, 7(1), 39-56.
- Umam, M. K. INNOVATION OF TRANSFORMATIVE ISLAMIC EDUCATION STRATEGY.
- Umam, M. K. (2020). DINAMISASI MANAJEMEN MUTU PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Al-Hikmah*, 8(1), 61-74.
- Umam, M. K. (2019). SCHOOL HEAD STRATEGY IN INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION IN SDIT AL-ARIF FROM THE PRASARANA MEANS STANDARD. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(1).
- Umam, M. K. (2019). DIMENSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF ERA DISRUPSI PERSPEKTIF MANAJERIAL BIROKRASI. *AL-WIJDÃ N: Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 127-146.
- Umam, M. K. (2019). STUDI KOMPARATIF PARADIGMA TEORI BELAJAR KONVENSIONAL BARAT DENGAN TEORI BELAJAR ISLAM. *Jurnal Al-Hikmah*, 7(2), 57-80.
- Umam, M. K. (2019). Lembaga Pendidikan Islam Dalam Telaah Lingkungan Strategik. *Jurnal Tinta*, 1(2), 16-29.